



Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol

Hartin Miftahul Jannah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako
email: hartinmiftahul@gmail.com

Erwan Sastrawan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako
email_erwansastrawanfeb@gmail.com

Harnida Wahyuni Adda

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako

Abstract: *This study aims to (1) describe the implementation of the Self-help Housing Stimulant Assistance Program in Siwalempu Village, Donggala Regency. (2) reviewing and measuring the effectiveness of the implementation of the BSPS program in Siwalempu Village, Donggala Regency. (3) future efforts so that program implementation runs effectively. The method used in this research is descriptive method with qualitative research. Sources of research data consist of observations, interviews, results of recording in the field and documentation. Based on the research results, it can be seen that (1) the implementation of the BSPS Program in Siwalempu village has been going quite well. (2) the implementation of the BSPS program in Siwalempu village, Donggala district has not been effective. This can be seen from the implementation of the BSPS program in Siwalempu village, which has not been fully achieved due to the fact that the program has not been fully used referring to the established mechanisms and procedures. This self-help housing stimulant assistance program is able to improve the social life of residents by helping residents in need.*

Keywords: *Implementation, Program, Self Help Housing Stimulant*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Siwalempu, Kabupaten Donggala. (2) mengkaji dan mengukur efektifitas pelaksanaan program BSPS di desa siwalempu kabupaten donggala. (3) upaya kedepan agar pelaksanaan program berjalan efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber data penelitian terdiri atas hasil observasi, wawancara, hasil pencatatan di lapangan dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa (1) Pelaksanaan Program BSPS di desa Siwalempu sudah berjalan cukup baik. (2) pelaksanaan program BSPS di desa siwalempu kabupaten donggala belum efektif, ini dapat di lihat dari pelaksanaan program BSPS di desa siwalempu belum sepenuhnya tercapai akibat program tersebut belum digunakan sepenuhnya mengacu pada mekanisme dan tata cara yang telah di tetapkan, efektifitas hanya terpenuhi dengan adanya program bantuan stimulan perumahan swadaya ini mampu meningkatkan jiwa sosial warga dengan membantu warga yang membutuhkan.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Program, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

LATAR BELAKANG

Rumah merupakan kebutuhan dasar setiap manusia sebagai tempat tinggal untuk bertahan hidup dan terlindung dari cuaca panas dan dingin selama jangka waktu tertentu. Namun bagi mayoritas masyarakat miskin, rumah hanya dijadikan sebagai tempat untuk terlindung tanpa memperhatikan kondisi kelayakannya. Salah satu masalah yang dihadapi masyarakat miskin di desa adalah tidak terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal yang layak huni disebabkan ketidakberdayaan masyarakat miskin untuk menjangkau atau memenuhi kebutuhan rumah layak huni karena kondisi ekonomi yang kurang baik (Mu'minin, 2018). Selain itu, karena rendahnya pengetahuan untuk menghuni rumah yang layak dan sehat, sehingga kurang memperhatikan kondisi kelayakan rumah yang dihuni. Pemerintah terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan perumahan layak huni bagi rumah tangga miskin, yakni dengan memperluas akses layanan perumahan yang sehat dan layak huni bagi masyarakat miskin. Salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) yaitu dengan memberikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai upaya untuk pengentasan rumah tidak layak huni dan meningkatkan taraf hidup agar lebih baik.

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 H Amandemen UUD 1945, rumah merupakan salah satu hak dasar rakyat, oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Usman 2018). Selain itu, rumah juga merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa. Pembangunan perumahan swadaya oleh masyarakat pada umumnya masih dirasakan belum memenuhi kualitas layak huni, cenderung tidak tertata dengan baik dan kurang didukung prasarana dan sarana yang memenuhi persyaratan lingkungan yang sehat. Menurut Suud, (2015) bahwa permukiman seperti ini cenderung bertambah luas dan membentuk lingkungan yang kumuh.

Menurut Cahyani, (2019) untuk mewujudkan rumah yang layak huni bukan perkara yang mudah. Ketidaksiapan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan masyarakat tentang fungsi rumah itu sendiri. Nursifa (2021) mengemukakan bahwa maksud dari kegiatan pendampingan BSPS adalah terlaksananya kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara tepat sasaran.

Dalam rangka meningkatkan kualitas hunian masyarakat, perlu dilakukan upaya menyadarkan masyarakat bahwa pembangunan perumahan menjadi tanggungjawab masyarakat sendiri. Oleh karena itu, pemberdayaan merupakan upaya yang harus dilaksanakan dengan cara memperkuat daya yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Selain itu, menurut Liwitara, (2022) diperlukan langkah-langkah positif untuk menciptakan iklim dan suasana yang kondusif bagi setiap pelaku terkait dalam pembangunan perumahan khususnya bagi penghuni. Perkuatan ini meliputi penyediaan fasilitas dan dukungan dalam membuka akses dan peluang yang dapat menjadikan masyarakat semakin berdaya. Untuk itu Pemerintah melaksanakan Kegiatan Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan juknis yang telah disediakan oleh Kementerian PUPR.

Dalam pelaksanaan kegiatan fasilitator maka dibutuhkan hal yang akan membantu dalam pelaksanaan kegiatan yakni: alat peraga BSPS 2022, alat peraga pendamping 2022, buku membangun rumah tembok, buku perbaikan dan peningkatan kualitas, buku rumah kayu panggung, buku rumah layak huni, buku rumah tembok, dan buku saku prinsip membangun RLH. Semuanya ditujukan untuk membantu dalam melaksanakan pendampingan pada Kawasan yang terkena Rumah tidak layak huni. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Dharma, (2021) bahwa prinsip dasar dari kebijakan Perumahan Swadaya ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tapi oleh seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya adalah dengan menjalankan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sehingga masyarakat bisa merasakan atau memiliki Rumah Layak Huni dan lingkungan hidup yang sehat dan asri.

Berdasarkan hasil observasi selama magang di desa Siwalempuh dan menjadi pendampingan fasilitator pemberdayaan pada masyarakat penerima bantuan BSPS. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tidak terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan keterlambatan pelaksanaan program dan proses pembangunan rumah tidak sesuai standar rumah layak huni. Hal ini sejalan dengan pendapat Mukhlis (2021) bahwa dalam pelaksanaan program BSPS masih dijumpai permasalahan antara lain kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga partisipasi masyarakat akan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Penelitian ini menarik untuk dikaji karena program BSPS merupakan program yang membantu masyarakat dalam hal rumah layak huni. Hal ini sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menyatakan pelaksanaan Program Sejuta Rumah (PSR) merupakan wujud nyata upaya pemerintah untuk menjawab tantangan dan kendala pembangunan perumahan di Indonesia. Program Sejuta Rumah dinilai dapat meningkatkan iklim investasi di sektor perumahan, membuka lapangan kerja sekaligus menyediakan hunian layak bagi masyarakat Indonesia (Prabantarikso, 2018). Selain itu, berdasarkan temuan yang didapat selama magang Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah, hal ini dilakukan untuk menstimulasi masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu membangun dan meningkatkan kualitas rumah layak huni. Selain dana yang diberikan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni, masyarakat dapat berswadaya dari segi materi maupun tenaga.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik menganalisis masalah dalam pelaksanaan program BSPS. Hal ini dilatarbelakangi banyaknya hambatan yang membuat program ini tidak selesai tepat waktu. Sementara misi dari PUPR dirjen perumahan dapat menyelesaikan rumah layak huni sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Namun pada kenyataan yang terjadi dilapangan, terdapat permasalahan-permasalahan yang ada yaitu, menurut salah satu informan yang ada di desa Siwalempu banyaknya masyarakat penerima bantuan yang kurang mampu. Dengan adanya penelitian ini dapat membantu meminimalisir hambatan yang terjadi pada program BSPS kedepannya. Diharapkan penelitian ini juga menjadi bahan evaluasi program BSPS selanjutnya.

3. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan masalah dan fokus penelitian (Sugiyono, 2019). Penelitian kualitatif menurut Moleong (2017) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Metode yang digunakan ialah PAR (Participatory Action Research). Menurut (Setyaningsih & Asnawi, 2021) metode PAR lebih efektif karena lebih fokus kepada masyarakat sehingga bisa lebih optimal dalam penyelesaian masalah yang ada dan mendukung peran aktif. Fasilitator secara langsung melakukan analisis situasi penerima bantuan, menggali permasalahan dari penerima bantuan, berdiskusi dan menawarkan alternatif solusi yang diinisiasi oleh penerima bantuan, dan pada akhirnya solusi tersebut bermanfaat untuk penerima bantuan.

Penelitian ini melihat secara langsung tahapan proses pelaksanaan BSPS untuk dianalisis. Peneliti langsung turun ke lapangan untuk menggumpulkan data penerima bantuan. Langkah yang digunakan untuk mendapatkan data pada penelitian ini menggunakan pedoman pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi yang dibantu dengan menggunakan kamera untuk memotret pelaksanaan pembangunan rumah layak huni.

Kegiatan Program BSPS dilaksanakan di desa Siwalempu, Kabupaten Donggala pada tahun 2022. Strategi pelaksanaan program BSPS dilaksanakan secara bertahap yang dilakukan melalui 9 tahapan.

Fasilitator/Koordinator Kabupaten. Kegiatan dilaksanakan pada tahun 2020. Strategi pelaksanaan pengabdian dilaksanakan secara bertahap yang dilakukan melalui 9 tahapan. Adapun 9 tahapan pelaksanaan program BSPS sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan tim

Teknis Fasilitator berkoordinasi menggunakan media telekomunikasi dengan pemerintah setempat. Hasil koordinasi tersebut dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh PPK untuk mengadakan pertemuan di desa Siwalempu bertujuan untuk menyosialisasikan program kepada masyarakat desa Siwalembuh Kecamatan Sojol. Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan di kantor desa yang dihadiri oleh masyarakat desa Siwalempuh. Sosialisasi menggunakan layar proyektor yang disampaikan oleh tim fasilitator program BSPS. Sosialisasi ini dibuka langsung oleh kepala Desa/Lurah Siwalempuh.

3. Verifikasi Calon Penerima Bantuan (CPB)

Fasilitator mengidentifikasi calon penerima bantuan apakah data calon penerima bantuan sudah terverifikasi dengan benar

4. Pendataan

Fasilitator turun langsung ke lapangan untuk mendata rumah tidak layak huni di desa Siwalempu bertujuan untuk mengetahui kelengkapan administrasi penerima bantuan dan tingkat keswadayaan masyarakat.

5. Rembuk warga (Pengorganisasian CPB)

Fasilitator melaksanakan rembuk bersama CPB untuk menentukan anggota kelompok yang bertanggung jawab atas kendali penerimaan bahan bangunan (penjelasan tentang standar kualitas bahan bangunan). Selain itu, rembuk ini bertujuan untuk memilih ketua, wakil, sekertaris dan bendahara dalam satu kelompok CPB.

6. Penyusunan dan pengesahan

Proposal penyiapan dan pengiriman dokumen proposal dilakukan secara aman.

7. Serah terima buku tabungan

Setelah penerima bantuan melengkapi administrasi keseluruhan maka fasilitator akan mendampingi untuk diberikan serah terima buku tabungan yang mana dana BSPTS akan dicairkan pada penerima bantuan sendiri.

8. Pengiriman bahan bangunan

Dapat dilakukan 1 tahap fasilitator memastikan secara langsung atau melalui KPB bahwa KPB telah memeriksa bahan bangunan dan menandatangani nota pengiriman

9. Pendampingan pelaksanaan fisik TFL

Dimana pada kegiatan ini fasilitator menyusun jadwal pelaksanaan fisik menggunakan RAPID ASSESSMENT.

10. Pembayaran bahan dan upah

Setelah progres pembangunan telah terlaksana 30% dengan dibuktikan telah berdirinya kusen jendela maka tahap pembayarann bahan dan upah tukang bisa segera cair dan diberikan.

4. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Program BSPTS Desa Siwalempu

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan (Ahadiyah,2012).

Berdasarkan penjelasan di atas, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPTS) mengacu pada SE Direktorat Jenderal Perumahan No 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya. MBR yang lolos verifikasi sebagai penerima bantuan menerima bantuan berupa uang sebesar Rp. 17.500.000 di rekening masing-masing. Bantuan digunakan untuk pembelian material bahan bangunan. Setelah masyarakat penerima bantuan menerima bantuan, mereka akan memulai proses pengerjaan rumah.

Adapun bagian-bagian yang difokuskan untuk pengerjaan rumah yaitu, ALADIN (Atap, lantai, dinding). Dimana, warga penerima bantuan harus memaksimalkan anggaran yang diberikan untuk peningkatan kualitas bangunan rumah dari kondisi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Masyarakat penerima bantuan juga harus mempunyai swadaya dari mereka sendiri guna mendukung pelaksanaan kegiatan pelaksanaan konstruksi rumah agar dapat berjalan dengan baik. Umumnya,

masyarakat penerima bantuan memiliki swadaya berupa tenaga orang, uang serta material bangunan yang sudah dimiliki.

Peserta magang melakukan pendampingan teknis pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) secara langsung terhadap delapan orang penerima bantuan mulai dari tahapan perencanaan sampai pada pelaksanaan konstruksi bangunan rumah. Masing-masing penerima bantuan memiliki tipe bangunan rumah yang berbeda seperti tipe bangunan permanen full dinding tembok, bangunan rumah tapak dinding papan kayu, dan bangunan rumah panggung kayu. Hal ini sejalan dengan pendapat Idris, (2023) bahwa tenaga fasilitator lapangan merupakan ujung tombak dari pelaksanaan program BSPS yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pembangunan, serta membentuk kelompok masyarakat penerima bantuan agar dapat berswadaya secara berkelompok dalam membangun rumah layak huni

Masyarakat bersama tukangya disampaikan tentang aturan teknis pelaksanaan konstruksi bangunan sesuai standar aturan rumah layak huni. Pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan rumah juga dilakukan dengan melakukan kunjungan langsung ke tempat penerima bantuan. Hal tersebut dilakukan karena melihat kondisi di desa siwalempu berupa kebiasaan pembangunan rumah oleh penerima bantuan dan tukang yang tidak sesuai dengan standar aturan bangunan rumah layak huni.

Kearifan budaya lokal juga masih cukup terjaga dilihat dari kebiasaan membangun sesuai waktu yang dianggap hari baik. Melalui pendampingan teknis, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman penerima bantuan dan tukang mengenai tata cara pelaksanaan konstruksi bangunan rumah yang benar. Hal ini sesuai dengan pendapat Timbu, (2021) bahwa salam hal pembangunan di segala bidang khususnya pembangunan permukiman dan perumahan, masyarakat berperan sebagai pelaku utama sementara pemerintah berperan sebagai pihak yang berkewajiban bertugas mengarahkan dan membimbing serta menciptakan suasana kondusif.

2. Efektifitas pelaksanaan program BSPS di desa siwalempu kabupaten donggala

Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Dan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa Siwalempu tentunya tidak terlepas dari apakah sudah berjalan efektif dan tidak nya program BSPS ini bisa di lihat dari masalah administrasi, alokasi waktu dan lain-lain. hal ini sejalan dengan pendapat Rusli, (2015) bahwa pada pelaksanaan program Bantuan Stimulan Dan Perumahan Swadaya (BSPS) tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya masalah atau kendala. Yang membuat pelaksanaan program BSPS belum berjalan secara efektif ini bisa di lihat dari beberapa aspek antara lain :

1. Aspek lingkungan SDM dalam bidang Pembangunan

Masalah yang ditemui penulis saat melakukan observasi adalah minimnya masyarakat yang memang ahli dalam bidang pembangunan yang membuat mereka harus membayar jasa tukang untuk membangun rumah mereka.

Pada dasarnya bantuan stimulan rumah swadaya merupakan dana suntikan untuk masyarakat agar bisa menstimulus atau merangsang masyarakat agar dapat merenovasi rumah mereka agar menjadi rumah layak huni bukan membangun rumah baru yang dengan dana yang diberikan pemerintah memang hanya akan cukup merenovasi bukan membangun baru.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan bapak Suardi (penerima bantuan) :

“pelaksanaan program BSPS disini tentunya dipengaruhi oleh swadaya masyarakat sekitar, masyarakat yang menerima bantuan harus melaksanakan perbaikan rumahnya dengan bergotong-royong, namun kenyataannya sebagian besar penerima bantuan tidak mempunyai keahlian dalam membangun rumah.”

Peneliti juga melakukan wawancara sama pak havid selaku penerima bantuan BSPS di dusun 5 desa siwalempu :

“ kami ini tidak mempunyai keahlian bertukang jadi uang yang akan kami terima akan dipotong sebesar Rp.2.500.000,00 sebagai upah tukang nantinya”.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan uang yang diterima masyarakat sebanyak Rp.20.000.000,00 akan dipotong sebesar Rp.2.500.000,00 untuk upah tukang yang tentunya akan mengurangi anggaran dalam membeli bahan bangunan, sehingga pembangunan tidak tercapai dengan yang telah direncanakan, hal ini terjadi karna tidak semua penduduk di desa siwalempu kabupaten donggala, mempunyai keterampilan atau ahli dalam pembangunan.

2. Aspek budaya Kebiasaan membangun rumah yang tidak sesuai dengan standar bangunan rumah layak huni

Beberapa penerima bantuan dan tukangya masih melakukan kegiatan pembangunan rumah yang tidak memenuhi standar pembangunan rumah layak huni program BSPS.

Mereka mengungkapkan hal tersebut dilakukan untuk efisiensi penggunaan material bangunan. Alhasil, output rumah masih memiliki kualitas yang belum memenuhi indikator rumah layak huni.

Dari hasil wawancara peneliti terhadap salah satu penerima bantuan pak havid yaitu :

“sebelum kami menerima bantuan BSPS ini saya dan masyarakat lainnya membangun rumah dengan bahan bangunan yang kami gunakan dan aman-aman saja walau tidak pakai bahan bangunan sesuai ketentuan dari BSPS dan juga bahan bangunan yang di tentukan tergolong lebih mahal yang tentunya membuat anggaran yang diberikan pasti tidak cukup”

Dalam pelaksanaan pembangunan Beberapa temuan dari hasil konstruksi yang dilakukan pada program BSPS di desa Siwalempu, antara lain:

1. Dimensi pondasi kurang dalam/kurang lebar
2. Ikatan antara pondasi dengan sloof tidak ada
3. Dimensi sloof belum memenuhi
4. Rumah tembok yang menggunakan kolom kayu
5. Dimensi kolom belum memenuhi
6. Tulangan sloof, kolom atau ringbalk yang ter-ekspose
7. Diameter tulangan utama kurang dari 10 mm dan tulangan Sengkang kurang dari 8 mm
8. Kesalahan jarak antar Sengkang yang lebih dari 15 cm

Hal ini tentunya jadi perhatian untuk kedepannya karna kurang perhatian masyarakat untuk membangun sesuai peraturan agar menjadikan rumah layak huni, tentunya dapat disimpulkan dalam tahap prosedur pembangunan belum efektif.

3. Aspek Administrasi Kelengkapan Dokumen Administrasi dan Pendidikan yang Tergolong rendah

Beberapa masyarakat yang telah lolos verifikasi sebagai penerima bantuan masih terdapat kendala mengenai kelengkapan dokumen administrasi. Misalnya, penerima bantuan atas nama Udin S. memiliki masalah terkait Kartu Tanda Penduduk (KTP), dimana yang bersangkutan memiliki Nomor Induk Kependudukan yang tidak valid sehingga atas nama yang bersangkutan belum dapat dilakukan pembuatan buku rekening. Hal tersebut juga menghambat pencairan dana untuk pembayaran bahan material bangunan.

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mamangkey, (2019) Hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa kendala di lapangan seperti suplay bahan dari toko penyalur bahan tidak sesuai dengan kesepakatan dengan penerima bantuan, harga bahan bangunan yang tiba-tiba naik. Kemudian didapati di lapangan ada beberapa masyarakat yang ternyata masih mampu namun menerima program BSPS dikarenakan masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Pihak Fasilitator.

Sedangkan pada penelitian ini kendala yang di hadapi adalah penerima bantuan berada dalam kategori lanjut usia (lansia) juga memiliki pendidikan yang tergolong rendah. Contohnya, penerima bantuan atas nama Suardi, Irfan, dan Saning memiliki masalah dalam baca tulis. Hal tersebut mengakibatkan kegiatan pendampingan penyusunan dokumen teknis seperti dokumen rencana teknis, dokumen RAB menjadi lambat.

4. Upaya untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan kegiatan BSPS

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan program pembangunan pemerintah yang dilaksanakan secara nasional untuk mengatasi dan mencegah masalah rumah yang tidak layak huni. Pada program ini terdapat kendala yang dihadapi yang menyebabkan pelaksanaan program tidak berjalan efektif, maka dari itu Perlu adanya upaya dan inovasi untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun upaya untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan kegiatan BSPS sebagai berikut:

a. Upaya Mengatasi Masalah Terbatasnya SDM dan alokasi anggaran

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah setempat mengenai SDM dan optimalisasi anggaran dalam program BSPS yaitu, dengan mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman masyarakat dalam program BSPS ini dan apa yang menjadi tujuan serta manfaat dari program BSPS yang ditujukan untuk masyarakat. Penjelasan di atas sejalan dengan penelitan oleh Yudhantara, (2021) bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat. Selain itu, masyarakat juga diberikan motivasi mengenai kesukarelaan dalam mengikuti kegiatan ini.

Upaya yang dilakukan oleh pihak pelaksana dalam mengatasi hambatan yang terjadi selama pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah memperbaiki kekurangan yang ada pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terkait kelengkapan dan pembaharuan data informasi masyarakat penerima bantuan, pengoptimalisasian anggaran yang akan digunakan, rutin melakukan kegiatan sosialisasi dengan memberikan pemahaman serta motivasi kepada individu agar semua masyarakat memiliki kesukarelaan dalam mengikuti kegiatan ini sehingga dapat ikut memberikan swadayanya dalam pelaksanaan program BSPS.

b. Upaya Mengatasi Masalah Kebiasaan membangun rumah yang tidak sesuai dengan standar bangunan rumah layak huni

Upaya untuk mengatasi masalah kesalahan proses pembangunan rumah, yaitu rutin melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap tukang mengenai aturan teknis pelaksanaan pembangunan rumah menggunakan pedoman yang telah dibuat. Selain itu, pengawasan langsung juga dilakukan dengan mengambil dokumentasi proses pengerjaan pelaksanaan pembangunan rumah

c. Upaya Mengatasi Kelengkapan Dokumen Administrasi dan Pendidikan yang Tergolong rendah

Untuk mengatasi masalah kelengkapan dokumen administrasi terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak valid, TFL dan peserta magang melakukan koordinasi kepada penerima bantuan yang bersangkutan untuk segera melakukan kegiatan pembaharuan data informasi ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Kedepannya untuk peningkatan pelaksanaan program BSPS, data terkait calon penerima bantuan harus dilakukan pemeriksaan data terbaru bekerja sama dengan pemerintah daerah sebelum

d. Upaya Mengatasi Masalah Terbatasnya alokasi anggaran

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah setempat mengenai optimalisasi anggaran dalam program BSPS yaitu, dengan mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman masyarakat dalam program BSPS ini dan apa yang menjadi tujuan serta manfaat dari program BSPS yang ditujukan untuk masyarakat. Penjelasan di atas sejalan dengan penelian oleh Yudhantara, (2021) bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat. Selain itu, masyarakat juga diberikan motivasi mengenai kesukarelaan dalam mengikuti kegiatan ini.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan data informasi yang diperoleh di lapangan dan telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan :

Pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa Siwalempu belum berjalan secara efektif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa, masih banyak masyarakat penerima bantuan yang mengeluhkan dana yang diberikan tidak cukup, pelaksanaan pembangunan masih terdapat beberapa rumah yang dibangun tidak sesuai dengan prosedur dan teknis yang ditetapkan, karna masyarakat masih mengikuti budaya membangun rumah sebelumnya, tetapi dari segi Meningkatkan jiwa social masyarakat sangat efektif karna walaupun mereka tidak mempunyai skill dalam hal membangun rumah tapi mereka dengan antusias bergotong-royog memberikan swadaya tenaga untuk membantu dalam proses pembangunan rumah.

Masalah atau kendala yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa Siwalempu antara lain kelengkapan dokumen administrasi yang belum terpenuhi, beberapa penerima bantuan (Lansia) memiliki tingkat pendidikan yang tergolong masih rendah sehingga menghambat penyusunan dokumen administrasi dan terbatasnya alokasi anggaran mengakibatkan penerima bantuan harus memberikan swadaya yang cukup besar.

Upaya yang dilakukan oleh pihak pelaksana dalam mengatasi hambatan yang terjadi selama pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah memperbaiki kekurangan yang ada pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terkait kelengkapan dan pembaharuan data informasi masyarakat penerima bantuan, pengoptimalisasian anggaran yang akan digunakan, rutin melakukan kegiatan sosialisasi dengan memberikan pemahaman serta motivasi kepada individu agar semua masyarakat memiliki kesukarelaan dalam mengikuti kegiatan ini sehingga dapat ikut memberikan swadayanya dalam pelaksanaan program BSPS.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadiyah, S. N. (2012). Implementasi Pasal 4 Permendagri No. 24 Tahun 2006 Mengenai pelaksanaan Program Pelayanan Satu Pintu Dalam Meningkatkan Pelayanan Perijinan Mendirikan Bangunan (Studi Di BP2T Kota Malang) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Cahyani, S. D., Poerwoningsih, D., & Wahjutami, E. L. (2019). Konsep Hunian Adaptif Sebagai Upaya Penanganan Rumah Tinggal Tidak Layak Huni Terhadap Resistensi Penyakit Infeksi. *Mintakat Jurnal Arsitektur*, 20(2), 73-91.
- Dharma, B., & Bangun, M. (2022). Evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Di Kota Subulussalam Provinsi Aceh. *Jurnal Prointegrita*, 6(3), 60-78.
- Idris, N. O., Pratama, A. M. M., & Badaruddin, M. (2023). Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Tenaga Fasilitator Lapangan BSPS Menggunakan Metode Multi Factor Evaluation Process. *Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JSON)*, 4(2), 335-342
- Liwitara, R. (2022, April). Instrument pengendali panduan harga upah dan bahan di kabupaten/kota pada program BSPS Provinsi Lampung. In *Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP) (Vol. 2, No. 1)*.
- Mamangkey, A., Lumolos, J., & Pangemanan, F. (2019). Pelaksanaan Program Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 3 (3).
- Moleong, L. J.. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mukhlis, S., & Siam, Nu (2021). Evaluasi Program Bantuan Stimulasi Perumahan Mandiri (Bsps) Di Kabupaten Tanjung Unggat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2 (2), 445-460.
- Mu'minin, Z. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. (Skripsi Program Studi Administrasi Negara, Universitas Jember)
- Nursifa, N. (2021). Pelaksanaan Program Bantuan Stimulasi Perumahan Mandiri (Bsps) Di Desa Basi Kecamatan Basidondo Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Penelitian Inovasi*, 1 (12), 2575-2582.
- Prabantariko, R. M. (2018). Model Kolaborasi Strategis Stakeholders Dalam Mendukung Pembangunan Perumahan Berkelanjutan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Doctoral dissertation, Institut Pertanian Bogor).
- Rusli, Z. (2015). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Dharmasraya. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(2), 1-13.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Suud, B., & Navitas, P. (2015). Faktor-faktor Penyebab Kekumuhan Permukiman di Kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya. *Jurnal Teknik ITS*, 4(1), C33-C35.
- Timbu, M. A. R., Langga, L., & Tanusi, G. (2021). Analisis Program Bantuan Stimulan Pperumahan Swadaya (Bsps) Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pada Kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemuukiman Dan Pertanahan Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2017. *Scientific Journal Of Management And Business (SJMB)*, 1(1), 41-55..
- Yudhantara, A. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Bsps) Tahun 2019 Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan (Doctoral dissertation, IPDN Jatinangor).